

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sudah jelas bahwa masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu/kelompok lain, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di beberapa Negara di dunia. Masyarakat yang berbeda mempunyai persepsi yang berbeda pula tentang apa itu adil (merata) dan norma-norma sosial budaya, sehingga kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan tetap saja menimbulkan konsensus bahwa terjadi ketidakmerataan yang cukup besar dalam hal distribusi pendapatan (Setianegara, 2008:88).

Data dekade 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara sedang berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat atau dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi (Tambunan, 2001:72). Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak (Hariadi *et al.*, 2007:4).

Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan dalam besarnya pemerataan pendapatan suatu daerah, banyak kendala yang dihadapi untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut. ketimpangan yang terjadi antara si miskin dan si kaya sangat besar. Misalnya ketimpangan yang terjadi pada petani, petani yang memiliki lahan yang luas akan lebih maksimal memperoleh pendapatan per kapita, sedangkan petani yang memiliki lahan sempit mereka sudah mengelola lahannya sedemikian rupa namun hasilnya tetap minim, apalagi para buruh yang tidak mempunyai lahan mereka hanya pasrah mengandalkan gaji dari para petani besar. Selain itu para petani kecil tersebut tidak memiliki keahlian atau pendidikan yang tinggi sehingga mereka tidak bisa bekerja disektor non pertanian.

## **2.1. Mengukur Ketimpangan**

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analistis dan kuantitatif: distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan dan distribusi pendapatan “fungsional” atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi. (Tondaro dan Smith, 2006:234).

### **2.1.1. Distribusi Ukuran**

Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) ini merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Tondaro dan Smith, 2006:234).

### **2.1.2. Distribusi Fungsional**

Ukuran distribusi pendapatan kedua yang lazim digunakan oleh kalangan ekonom adalah distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (*functional or factor share distribution of income*). Ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal, uang, dan modal fisik). (Tondaro dan Smith, 2006:240).

### **2.1.3. Distribusi Pendapatan Perorangan**

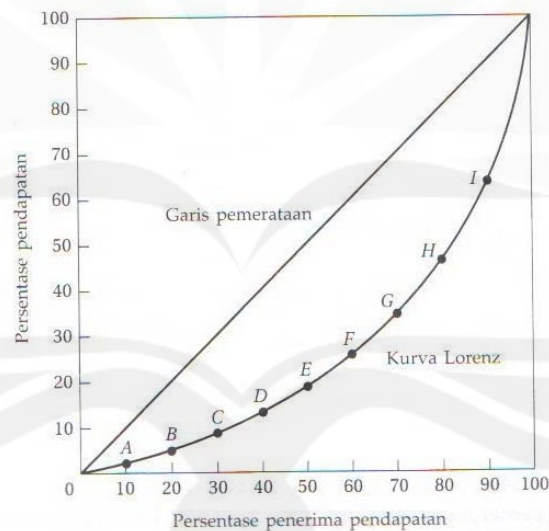
Ukuran distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution*) merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran sederhana ini menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Bagaimana caranya pendapatan itu diperoleh tidak diperhatikan. Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi, atau apakah pendapatan itu berasal dari hasil kerja semata ataukah sumber-sumber lain. Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik lebih suka menyusun semua individu menurut tingkat pendapatannya yang semakin tinggi dan kemudian membagi semua individu tersebut kedalam

kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Metoda yang umum adalah membagi penduduk ke dalam kuantil (5 kelompok) atau desil (10 kelompok) sesuai dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi tersebut dan kemudian menentukan proporsi dari pendapatan nasional total yang diterima dari masing-masing kelompok tersebut (Arsyard,1999:227).

#### 2.1.4. Kurva Lorenz

Metode lainnya yang lazim dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz (*Lorenz curve*).

**Gambar 2.1**  
**Kurva Lorenz**

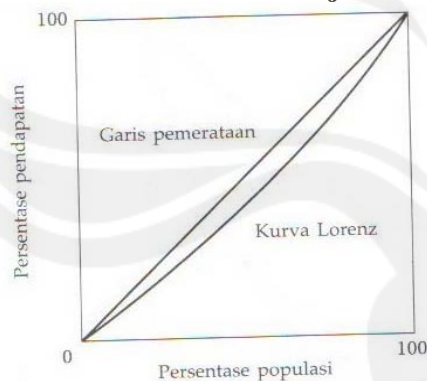


Sumber: Todaro dan Smith (2006:237).

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selamanya, misalnya satu tahun (Todaro dan Smith, 2006:238). Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau

tidak merata distribusi pendapatannya. Kasus ekstrem dari ketidakmerataan yang sempurna (yaitu, apabila hanya seorang saja yang menerima seluruh pendapatan nasional, sementara orang-orang lainnya sama sekali tidak menerima pendapatan) akan diperlihatkan oleh kurva Lorenz yang berhimpit dengan sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal disebelah kanan. Oleh karena tidak ada satu negara pun yang memperlihatkan pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna di dalam distribusi pendapatannya, semua kurva Lorenz dari setiap negara akan berada di sebelah kanan garis diagonal seperti ditunjukkan pada gambar 2.2. gambar 2.2.a menunjukkan suatu distribusi pendapatan yang relative merata (ketimpangannya tidak parah). Sedangkan gambar 2.2.b menunjukkan distribusi yang relative tidak merata (ketimpangannya parah).

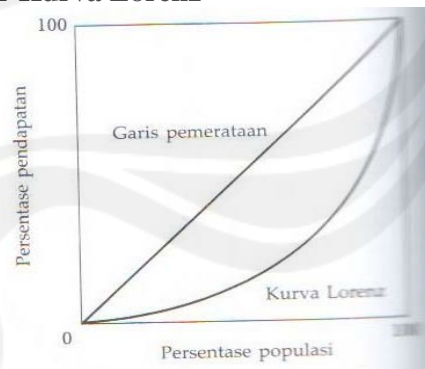
**Gambar 2.2**  
**Menunjukkan Gambar Kurva Lorenz**



**Gambar 2.2.a**

**(Ketimpangan tidak parah)**

Sumber : Todaro dan Smith (2006:238).



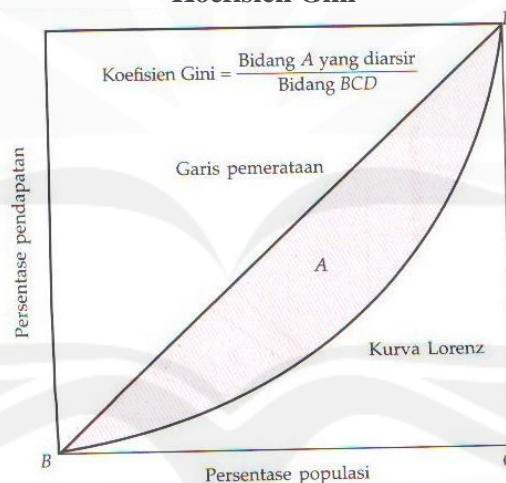
**Gambar 2.2.b**

**(Ketimpangan Parah)**

### 2.1.5. Koefisien Gini

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70 sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Pada gambar 2.3 rasio ini adalah rasio daerah A yang diarsir dibagi dengan luas segi tiga BCD. Todaro dan Smith (2006:237).

**Gambar 2.3**  
**Koefisien Gini**



Sumber : Todaro dan Smith (2006:239).

Secara sistematis rumus Koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut:

(Arsyard, 1999; 232-233)

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana:

$KG$  = Angka Koefisien gini

$X_i$  = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$

$f_i$  = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas  $i$

$Y_i$  = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$ .

## 2.2. Kemiskinan di Pedesaan

Salah satu generalisasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencarian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional (biasanya dilakukan secara bersama-sama), mereka kebanyakan wanita dan anak-anak daripada laki-laki dewasa, dan mereka sering terkonsentrasi di antara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Data *actual* dari berbagai Negara berkembang ternyata turut menunjang generalisasi ini. Sebagai contoh, telah diketahui sejak lama bahwa sekitar dua pertiga penduduk miskin di Negara-negara berkembang masih menggantungkan hidup mereka dari pola pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang penghasilannya rendah. (Todaro dan Smith, 2006:269).

## **2.3. Pemerataan (*Equality*), Ketimpangan (*Inequality*) dan Kemiskinan (*Proverty*)**

### **2.3.1. Pentingnya Pemerataan**

Isu pemerataan distribusi pendapatan adalah merupakan isu yang sangat kompleks karena terkait dengan nilai-nilai sosial budaya, sehingga pembuat kebijakan ekonomi harus mencurahkan perhatian yang besar terhadap masalah ini karena sejumlah alasan sebagai berikut:

- a. Sebagai masyarakat memandang pemerataan pendapatan sebagai tujuan yang layak dicapai karena menyangkut masalah keadilan sosial.
- b. Kebijakan pemerataan pendapatan, secara langsung dan tidak langsung dijalankan untuk menurunkan kemiskinan.
- c. Adanya beberapa kebijakan yang dilakukan saat ini akan berdampak pada pengurangan kesejahteraan untuk generasi yang akan datang → isu penting di beberapa Negara transisi dan industri.
- d. Kebijakan pemerataan dalam semua bidang dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi konflik politik (Setianegara, 2008:89).

## **2.4. Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan**

Penghapusan kemiskinan dan perkembangannya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian



utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (*assets*), namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di NSB. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain. Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti: pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, perdagangan internasional, dan sebagainya. Pembahasan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan ini sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, pada bagian ini lebih ditekankan pada pembahasan masalah distribusi pendapatan dengan menyinggung sedikit masalah mengenai kemiskinan. Sebuah cara yang sederhana untuk mendekteksi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-barang kebutuhan pokok (*necessity goods*) seperti: makanan pokok, pakaian, rumah, dan sebagainya, kedua adalah barang-barang mewah seperti: mobil mewah, video, televisi, pakaian mewah dan sebagainya. (Arsyad, 1999:224-225).

## **2.5. Karakteristik Ekonomi Kelompok Masyarakat Miskin**

Sampai sekian jauh, kita telah memperoleh gambaran secara garis besar atas masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Negara-negara miskin. Kita telah memahami bahwa perpaduan tingkat pendapatan per kapita yang rendah dan

distribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah. Jelas bahwa, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu, semakin tinggi pendapatan per kapita yang ada, maka akan semakin rendah jumlah kemiskinan absolut. Akan tetapi sebagaimana telah diungkapkan, tingginya tingkat pendapatan per kapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan absolut. Pemahaman terhadap hakikat distribusi ukuran pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah kemiskinan di Negara-negara yang berpendapatan rendah. Namun penggambaran kemiskinan absolut secara garis besar saja tidaklah cukup. Sebelum kita dapat merumuskan program dan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk memerangi sumber-sumber kemiskinan, diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai siapa yang termasuk dalam kelompok miskin itu, dan apa saja karakteristik-karakteristik mereka (Todaro dan Smith, 2006:267).

## **2.6. Studi Terkait**

Penelitian yang dilakukan oleh Hariadi, et al., (2007) tentang ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Jawa Tengah. Penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang sejauh mana dampak kebijakan pembangunan daerah di Banyumas ketika ada dampak dari kenaikan harga BBM dan kenaikan upah dan gaji PNS yang memicu inflasi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang terbatas di Banyumas sehingga mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan

ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga di Kabupaten Banyumas sampai dengan saat ini. Kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga tersebut terjadi karena semakin menurunnya pendapatan relatif dan pendapatan riil oleh 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah akibat; (1) dari sisi penawaran antara lain terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah; (2) dari sisi permintaan antara lain karena kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi usaha mereka dan permintaan yang rendah akibat inflasi dan kenaikan harga BBM sejak 2005 sehingga terjadi penurunan daya beli konsumen sehingga tidak meningkatkan pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil.

Penelitian lain dengan topik tentang pendapatan yakni dilakukan oleh Setianegara (2008) yang berjudul “Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi dan Kemiskinan”. Penelitian ini memaparkan permasalahan distribusi pendapatan di Indonesia yang didasarkan pada tiga jurnal dan satu artikel yaitu: *Poverty and The Inequality In The Soeharto Era: An Assesment oleh Anne Booth*, *Regional Inequality in Indonesia and the Initial Impact of The Economic Crisis* oleh Takohiro Akita dan Armida S. Alisjahbana, serta *Economic Growth and Income Inequality: Reexamining The Links* oleh Klaus Deininger dan Lyn Squire. Sedangkan artikel berjudul: *Should Equity be a Goal Economic Policy?* Oleh *Expenditure policy Division of The IMF’s Fiscal Affairs Departement*. Hasil penelitiannya memperoleh bukti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di beberapa negara di dunia.

Ketimpangan distribusi pendapatan regional di Indonesia terjadi di antar daerah, antar propinsi, dan di dalam propinsi. Krisis ekonomi Indonesia adalah krisis yang menimpa masyarakat kota di pulau Jawa. Dampak dari krisis adalah munculnya ketidakmerataan di Jawa-Bali terutama di wilayah perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2005) tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan pada masyarakat pedesaan, penelitian di Desa Giri Purwo Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam kegiatan perekonomian di Desa Giri Porwo yang sebagian besar penduduknya bermata pertanian namun kendala yang terjadi tidak adanya sistem irigasi dan hampir pasti kekurangan air menyebabkan hasil pertaniannya tidak maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertanian, namun harus mencari pilihan lain di dalam usaha mencari tambahan penghasilan, di samping mengusahakan usaha taninya juga bekerja sebagai buruh, tukang, dan lain sebagainya. Hasil penelitian memperoleh, pembangunan pedesaan melalui perbaikan pendapatan masyarakat masih harus dilaksanakan karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dipedesaan. Hampir 70% penduduk dunia yang termiskin tinggal di wilayah pedesaan yang penghidupan pokoknya bersumber pada pola pertanian subsisten.

Penelitian Firman dan Herlina (2004) yang berjudul Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pada Peternak Sapi Perah menunjukkan hasil perhitungan gini rasionya sebesar 0,2149. Dengan demikian tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di tingkat peternak sapi perah relatif rendah.

Rendahnya tingkat ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa antara peternak kaya dan miskin tidak terjadi gap yang lebar. Hal ini menandakan bahwa jumlah kepemilikan ternak dapat dijadikan ukuran untuk melihat ketimpangan namun produktivitas dan kualitas susu-lah yang berpengaruh terhadap pendapatan peternak.

